BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan timbulnya masalah permukiman. Masalah permukiman lebih terasa di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan. Masalah perumukiman perkotaan di Indonesia pada saat ini di antaranya adalah tempat tinggal serta lingkungan yang pada umumnya jauh dari syarat-syarat kehidupan keluarga yang layak. Permasalahan permukiman perkotaan yang terjadi terdapat pada kota-kota besar yang dapat menarik tingginya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin besar mengakibatkan tingginya beban permukiman terhadap kota penyangga.

Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga bagi Kota Jakarta. Keadaan tersebut menjadikan Kota Depok sebagai tempat hunian bagi orang-orang yang bekerja di Kota Jakarta, sehingga laju pertumbuhan penduduk menjadi begitu pesat. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan permukiman di Kota Depok. Para migran dan para pekerja yang berhuni di Kota Depok memiliki penghasilan yang berbeda-beda, sedangkan kebutuhan akan permukiman semakin meningkat sehingga mengakibatkan adanya permukiman dari yang elit atau mewah sampai dengan permukiman yang tidak layak huni atau permukiman kumuh.

Kondisi rumah maupun kualitas lingkungan pada kawasan permukiman kumuh tersebut sangat buruk, mengingat akses terhadap sarana dan prasarana dasar perkotaan terbatas. Di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2009 disebutkan bahwa Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas termasuk salah satu target Pemerintah Kota Depok dalam program penataan lingkungan permukiman kumuh (*RKPD Kota Depok, tahun 2009*).

Dalam dokumen revisi RTRW Kota Depok Tahun 2010 yang sedang dalam proses legalisasi juga disebutkan bahwa Kecamatan Pancoran Mas memiliki ciri khas adanya permukiman kumuh. Selain itu, dari hasil pengamatan di Kecamatan Pancoran Mas terdapat permukiman yang mempunyai indikasi sebagai permukiman kumuh, terutama Kelurahan Depok yang terdistribusi pada Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah, dan Kampung Manggah.

Rencana tindak yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah kekumuhan tergantung dari karakteristik kekumuhan suatu kawasan permukiman. Seperti contoh yang dapat dilihat pada pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga Kota Metropolitan bahwa upaya penanganan dapat dilakukan dengan 3(tiga) pendekatan diantaranya adalah pendekatan *property development* dapat dilakukan jika kawasan permukiman kumuh memiliki nilai ekonomis agar dapat dikelola secara komersial sehingga ekonomi lokasi yang tinggi dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan kawasan dan daerah, pendekatan *community based development* dapat dilakukan jika kawasan kurang mempunyai nilai ekonomis sehingga masyarakat menjadi pemeran utama dalam penanganan, *guided land development* dapat dilakukan jika kawasan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga penanganan lebih mengarah dan melindungi hak penduduk asal untuk tetap tingal pada lokasi semula.

Selain masalah adanya permukiman kumuh di Kelurahan Depok, permasalahan lain adalah rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam mensukseskan program-program pemerintah *(Profil Kelurahan Depok, tahun 2010).* Di sisi lain setiap kegiatan pembangunan akan efektif bila ada partisipasi masyarakat terutama masyarakat. Untuk melihat penanganan kawasan permukiman kumuh dapat diukur tingkat partisipasinya seberapa besar namun belum adanya partisipasi masyarakat di Kelurahan Depok maka yang bisa dinilai adalah tingkat kesadaran masyarakat. Dapat diasumsikan bahwa partispasi terjadi karena adanya motivasi kesadaran *(Sastroputro, Huraerah, 2008).*

Selain itu dalam program PNPM-P2KP oleh Kementrian Pekerjaan Ditjen Cipta Karya, pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi masalah sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan P2KP sebagai *"gerakan bersama membangun kemandirian dan pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai-nilai universal "* diyakini akan mampu membangun kesadaran kritis dan perubahan perilaku individu ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku individu yang secara kumulatif menimbulkan perubahan kolektif masyarakat inilah yang menjadi inti pendekatan TRIDAYA, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun : daya sosial sehingga tercipta masyarakat efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan *(website PNPM Mandiri Perkotaan).* Dalam dialog

interaktif tentang peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh para pengamat dan Direktur Jendral Cipta Karya menyatakan bahwa dalam program penanganan permukiman kumuh dikembalikan kepada masing-masing individu dimana kesadaran seseorang merupakan hal penting dalam mengatasi persoalan permukiman kumuh sehingga perlu ditanamkan kesadaran akan lingkungan sejak dibangku sekolah *(Website Ditjen Cipta Karya).*

Untuk itu perlu dinilai tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan permukiman kumuh dengan asumsi kesadaran dapat memicu timbulnya partisipasi masyarakat sehingga dapat membantu mensukseskan program-program pemerintah di Kelurahan Depok.

Dengan begitu, penelitian yang Berjudul "Identifikasi Pola Kekumuhan Kawasan dan Kesadaran Masyarakat" perlu dilakukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sebaran permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas agar dapat meningkatkan kualitas lingkungan pada permukiman kumuh yang ada tersebut dan dapat menentukan alternatif tindak penanganan yang harus dilakukan, sehingga dapat membantu Pemerintah Kota Depok dalam pembebasan permukiman kumuh.

1.2 Perumusan Masalah

Permukiman Kumuh di Kecamatan Pancoran Mas khususnya di Kelurahan Depok merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan sebuah perkotaan sebagai kota penyangga Kota Jakarta. Letak strategis Kelurahan Depok memicu pesatnya pembangunan perumahan dan permukiman. Terdapat tiga lokasi permukiman kumuh antara lain kawasan permukiman kumuh kampung lio yang terletak di belakang pasar Depok lama, dan sekitar bantaran setu rawabesar, kawasan permukiman kumuh kampung Belimbing Sawah yang terletak di sekitar bantaran sungai, di bawah jalur SUTT dan bantaran rel kereta api stasiun depok lama, serta kawasan permukiman kampong manggah yang terletak di belakang pertokoan dan perdagangan dan jasa di jalan raya margonda.

Berdasarkan profil Kelurahan Depok tahun 2010, rendahnya partisipasi masyarakat Kelurahan Depok dalam mensukseskan program-program pemerintah. Sehingga dapat menjadi hambatan dalam kegiatan pembangunan yang menjadi efektif

bila ada partisipasi. Berdasarkan teori konsep partisipasi bahwa kesadaran merupakan salah satu motivasi terjadinya partisipasi *(Sastroputro, Huraerah, 2008)*. Maka disumsikan perlu adanya tingkat kesadaran masyarakat untuk menimbulkan partisipasi dalam mensukseskan program-program pemerintah di Kelurahan Depok.

Berdasarkan uraian latar belakang, dengan permasalahan yang ada, yaitu permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Depok menyebabkan penelitian ini perlu dilakukan. Dengan begitu, pertanyaan yang harus di jawab oleh penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana karakteristik tingkat kekumuhan di lokasi studi?
b. Bagaimana karakteristik persepsi masyarakat di lokasi studi?
c. Bagaimana Karakteristik tingkat kesadaran masyarakat di lokasi studi
d. Bagaimana pola kekumuhan dan kesadaran lokasi studi?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pola kekumuhan kawasan dan kesadaran masyarakat permukiman kumuh di Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah, dan Kampung Manggah Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasarannya adalah:

a. Mengidentifikasi karakteristik tingkat kekumuhan di kawasan permukiman kumuh berdasarkan pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga Kota Metropolitan Ditjen Cipta Karya.
b. Mengidentifikasi karakteristik persepsi masyarakat terhadap lingkungan permukiman berdasarkan pada kriteria tingkat kekumuhan.
c. Mengidentifikasi karakteristik tingkat kesadaran masyarakat .
d. Mengidentifikasi pola kekumuhan kawasan dan kesadaran masyarakat.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini, terbagi menjadi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kecmatan Pancoran Mas memiliki 6 (enam) kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Mampang, Kelurahan Pancoran Mas, Kelurahan Depok, dan Kelurahan Depok Jaya. Yang menjadi wilayah studi dalam penelitian adalah Kelurahan Depok yang terdiri dari Kawasan permukiman kumuh di kampung lio terletak di belakang pasar Depok lama, dan sekitar bantaran setu Rawabesar. Di kampung Belimbing Sawah, permukiman kumuh terletak di sekitar bantaran sungai, di bawah jalur SUTT dan bantaran rel kereta api stasiun depok lama. Sedangkan di Kampung Manggah permukiman kumuh terletak di belakang pertokoan serta perdagangan dan jasa di jalan Raya Margonda.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Lingkup wilayah studi

Kampung	RW	RT
Lio	13	04
		05
		06
	14	03
		04
	19	01
		03
Belimbing Sawah	03	05
		06
Manggah	12	02
		05

Sumber: Dokumen Tataruang, Hasil Wawancara, dan Hasil Pengamatan

Berdasarakan tabel di atas informasi adanya permukiman kumuh diperoleh dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok yang menyatakan di Kecamatan Pancoran Mas terdapat banyak permukiman kumuh terutama di Kelurahan Depok. Informasi selanjutnya diperoleh dari Kelurahan Depok yang mengarahkan ke 3 (tiga) kampung dan oleh masing-masing Ketua RW di 3 (tiga) kampung tersebut diarahkan ke wilayah RT yang terdapat permukiman kumuh. Sehingga ruang lingkup wilayah dalam

penelitian adalah Kelurahan Depok yang terdiri dari 3 (tiga) kampung, 3 RW dan 11 RT. Dapat dilihat pada **Gambar 1.1**

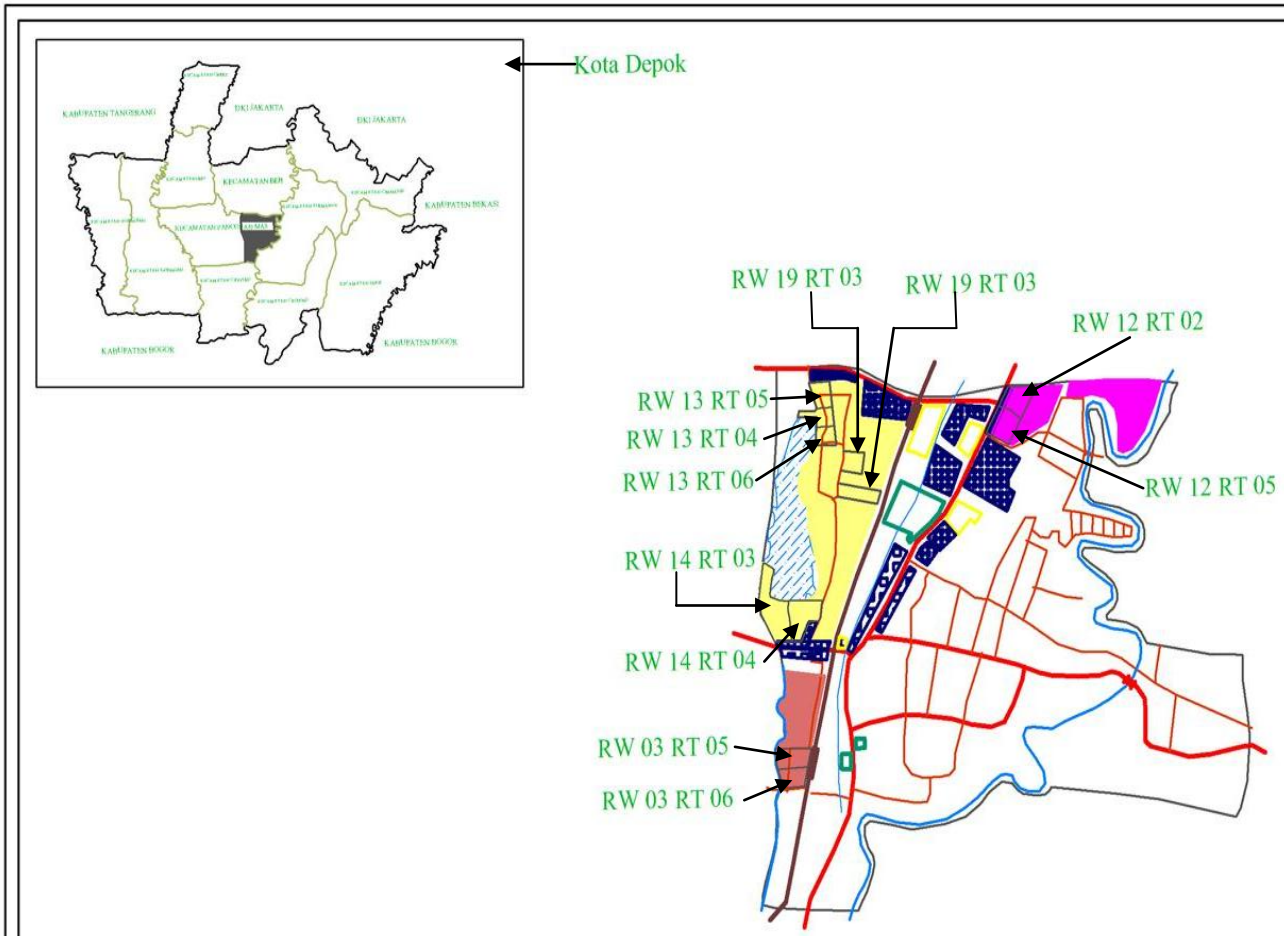
1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Tujuan dari penelitian yang berjudul "Identifikasi Pola Kekumuhan Kawasan dan Tingkat Kesadaran Masyarakat" terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu

1. Menilai dan mengkategorikan kawasan permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok menjadi 3 kelompok yaitu permukiman kumuh kategori tinggi, permukiman kumuh dengan kategori sedang dan permukiman kumuh dengan kategori rendah dengan menggunakan kriteria dari Direktorat Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang dimodifikasi pada beberapa criteria sehingga yang digunakan dalam penilaian adalah aspek vitalitas non ekonomi (kesesuaian tataruang, kondisi fisik bangunan yang terdiri dari kepadatan bangunan, building coverage, bangunan temporer, jarak antar bangunan, dan kondisi kepadatan penduduk), vitalitas ekonomi (letak strategis kawasan, jarak ke tempat mata pencaharian, dan fungsi kawasan sekitar), status tanah (dominasi status tanah, dan status kepemilikan lahan), ketersediaan prasarana dan sarana (jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan). Menemukan pola kekumuhan kawasan di Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah dan Kampung Manggah.
2. Menilai persepsi masyarakat terhadap lingkungan permukiman kumuh berdasarkan pada kriteria tingkat kekumuhan dengan kriteria penilaian yaitu kriteria vitalitas non ekonomi (kepadatan bangunan dan jarak antar bangunan serta kepadatan penduduk) dan prasarana dan sarana (jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan). Dengan begitu kesadaran masyarakat dikategorikan ke dalam kesadaran dengan kategori tinggi, kesadaran dengan kategori sedang, dan kesadaran dengan kategori rendah dengan membatasi lingkup materi pada aspek fisik lingkungan. Kemudian menemukan pola persepsi masyarakat di Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah dan Kampung Manggah.
3. Membandingkan pola persepsi masyarakat dengan pola kekumuhan kawasan dimana jika pola kekumuhan tinggi dan pola persepsi tinggi, sedang dan sedang serta rendah dan rendah, maka tingkat kesadaran masyarakat termasuk dalam

kategori tinggi. Jika tinggi dan sedang, sedang dan rendah, maka kesadaran masyrakat termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan jika tinggi dan rendah maka kesadaran masyarakat termasuk dalam kategori rendah. Setelah itu menemukan pola kesadaran masyarakat di Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah dan Kampung Manggah.

4. Mengidentifikasi pola kekumuhan kawasan sehingga dapat terlihat bagaimana karakteristik kawasan permukiman kumuh dengan tingkat kesadaran dimasing-masing lokasi studi sehingga dapat ditemukan tindak penanganan lokasi permukiman kumuh dengan pendekatan property development, community based development, dan guided land development yang mengacu pada pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyangga Kota Metropolitan Ditjen Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.


Kota Depok
RW 19 RT 03
RW 19 RT 03
RW 12 RT 02
RW 13 RT 05
RW 13 RT 04
RW 13 RT 06
RW 12 RT 05
RW 14 RT 03
RW 14 RT 04
RW 03 RT 05
RW 03 RT 06
PETA WILAYAH STUDI
GAMBAR 1.1
Jalan Raya
Jalan Lingkungan
Sungai
Batas RT
Setu
Kampung Lio
Kampung Belimbing Sawah
Kampung Manggah
U
NOT SCALE
JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNUVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2011

1.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terdiri dari metode pengumpulan data dan metode analisis data. Lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode primer dan metode sekunder. Metode pengumpulan data primer adalah metode pengumpulan data yang didapat secara langsung dari sumbernya, sedangkan Metode pengumpulan data sekunder adalah metode pengumpulan data yang pengumpulan datanya didapat secara tidak langsung dan pernah digunakan oleh orang lain dalam penelitian lain.

A. Pengumpulan Data Tingkat Kekumuhan

Pengumpulan data dengan menggunakan metode primer, yaitu dengan melakukan observasi langsung melihat dan mendokumentasikan kondisi eksisting permukiman yang ada di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sesuai dengan kebutuhan datanya, yaitu kondisi sarana dan prasarana permukiman berupa kondisi bangunan yang ada di permukiman kumuh, seperti jarak antar bangunan, building coverage, bangunan temporer yang ada, kepadatan bangunan, dan bangunan liar yang bertambah. Selain itu, untuk melihat dengan mendokumentasikan kondisi sarana dan prasarana permukiman kumuh yang ada berupa kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, dan kondisi persampahannya.

Wawancara juga dilakukan, yaitu dengan mewawancarai langsung narasumber yang berhubungan dengan kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas. Wawancara dilakukan baik oleh masyarakat/RT/RW/Lurah/Camat maupun pejabat tinggi yang berwenang mengenai kondisi permukiman kumuh yang ada, seperti Bapeda Kota Depok dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok. Wawancara yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai vitalitas non ekonomi permukiman kumuh (sesuai tata ruang, kondisi fisik bangunan dan kondisi kependudukan, vitalitas ekonomi (letak strategis kawasan, jarak ke tempat mata pencarian masyarakat, fungsi kawasan sekitar), status tanah (dominasi status dan status

kepemilikan tanah), kondisi prasarana dan sarana (kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan).

Tabel 1.2
Metode Pengumpulan Data Kekumuhan

Kriteria	Variabel	Metode Pengumpulan Data		Keterangan
		Primer	Sekunder	
Vitalitas Non Ekonomi	Kesesuaian Tata Ruang		√	Dokumen rencana tata ruang umum dan detail,
	Kondisi fisik bangunan	√		Observasi lapangan
	Kepadatan bangunan			
	Bangunan temporer	√		Observasi lapangan
	Building coverage	√		Observasi lapangan
	Jarak antar bangunan	√		Observasi lapangan
	Kondisi kependudukan		√	Dokumen Tataruang dan data BPS Kota Depok
	Kepadatan penduduk			
Vitalitas Ekonomi	Letak strategis kawasan		√	Dokumen rencana tata ruang umum dan detil
	Jarak ke Tempat Mata Pencaharian	√		Wawancara Ketua RW dan RT
	Fungsi Kawasan Sekitar		√	Dokumen rencana tata ruang umum dan detil
Status Tanah	Dominasi Status Tanah	√		Wawancara Ketua RW dan RT
	Status Kepemilikan Tanah	√		Wawancara Ketua RW dan RT
Kondisi Prasarana dan Sarana	Kondisi jalan lingkungan	√		Observasi lapangan
	Kondisi drainase	√		Observasi lapangan
	Kondisi air minum	√		Observasi lapangan
	Kondisi air limbah	√		Observasi lapangan
	Kondisi persampahan	√		Observasi lapangan

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

B. Pengumpulan Data Persepsi Masyarakat

Kuisioner juga dilakukan dengan list pertanyaan yang langsung diberikan kepada masyrakat di permukiman kumuh. Kuisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang kesadaran masyarakat di permukiman kumuh tentang tingkat kekumuhan dengan beberapa kriteria yang diambil dari Direktorat Pengembangan Permukiman, Departemen Pekerjaan Umum yaitu Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan. Beberapa kriteria yang diambil yaitu, kondisi fisik bangunan (kepadatan bangunan, dan jarak antar bangunan), kondisi kependudukan (kepadatan penduduk), kondisi prasarana dan sarana (kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan).

Tabel 1.3
Metode Pengumpulan Data untuk Menilai Persepsi Masyarakat

Kriteria	Variabel
Vitalitas Non Ekonomi	Kepadatan bangunan
	Jarak antar bangunan
	Kepadatan penduduk
Kondisi Prasarana dan Sarana	Kondisi jalan lingkungan
	Kondisi drainase
	Kondisi air minum
	Kondisi air limbah
	Kondisi persampahan

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

Dalam penyebaran kuesioner digunakan sampel sebagai subjek yang menjawab semua pertanyaan yang dipaparkan dalam kuesioner, yaitu perwakilan masyarakat permukima kumuh tersebut. Jumlah sampel diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus slovin.

Rumus Slovin:

Jumlah Sample = N / (1+N.e.e)

Dimana :

- n adalah jumlah sampel
- N adalah jumlah populasi (masyarakat permukiman kumuh)
- e adalah persentase toleransi ketidaktelitian (presesi) karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Dengan menggunakan rumus slovin jumlah sampel yang didapat di adalah 96 sampel dan digenapkan menjadi 100 sampel. Penyebaran sampel didistribusikan di 3 (tiga) kampung Kelurahan Depok yaitu Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah, dan Kampung Manggah. Jumlah sampel disetiap kampung didistribusikan secara acak sesuai dengan proporsi jumlah populasi di setiap RT atau RW.

Tabel 1.4
Jumlah Populasi dan Jumlah sampel

Kampung	**RW**	**RT**	**Jumlah KK**	**Jumlah sampel**
Lio	13	04	115	6
		05	120	8
		06	90	6
	14	03	200	12
		04	300	15
	19	01	180	9
		03	250	13
Belimbing Sawah	03	05	113	9
		06	180	6
Manggah	12	02	155	8
		05	146	8
Jumlah	5	11	1973	100

Sumber: Hasil Olahan, 2011

1.5.2 Metode Analisis Data

A. Analisis Tingkat Kekumuhan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan akurat terhadap hasil pembobotan/penilaian mengenai permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Depok berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat digunakan sebagai penentuan permukiman kumuh, yaitu kriteria validasi non ekomomi (kesesuaian tata ruang/RTRW/RDTR, kondisi fisik bangunan, dan kondisi kependudukan), status tanah (dominasi sertifikat tanah dan status kepemilikan tanah), dan kondisi prasarana dan sarana (kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air bersih, kondisi air limbah, dan kondisi persampahan). Metode pembobotan atau penilaian secara manual dengan menggunakan bantuan program komputer, yaitu program Microsoft Exel (*Spread Sheet Exel*).

Tabel 1.5
Parameter dan Variabel Kriteria Penilaian Kawasan Permukiman Kumuh

Kriteria	Variabel	Parameter		Nilai Bobot
Vitalitas Non Ekonomi	Kesesuaian Tata Ruang	Sesuai 25% Sesuai 25-50% Sesuai >50%		50 30 20
	Kondisi fisik bangunan	Kepadatan bangunan	>100 unit/ha 80-100 unit/ha <80 unit/ha	50 30 20
		Bangunan temporer	>50% 25%-50% < 25%	50 30 20
		Building coverage	>70% 50%-70% <50%	50 30 20
		Jarak antar bangunan	<1,5 m 1,5 m – 3 m >3 m	50 30 20
	Kondisi kependudukan	Kepadatan penduduk	>500 jiwa/ha 400-500 jiwa/ha <400 jiwa/ha	50 30 20
Vitalitas Ekonomi	Letak strategis kawasan	Sangat strategis Kurang strategis Tidak strategis		50 30 20
	Jarak ke Tempat Mata Pencaharian	> 10 km 1 - 10 km < 1 km		50 30 20
	Fungsi Kawasan	Pusat bisnis dan perkantoran		50

Kriteria	Variabel	Parameter	Nilai Bobot
	Sekitar	Pusat pemerintahan Permukiman dan lainnya	30 20
Status Tanah	Dominasi Status Tanah	Girik (bukan SHM/SHGB) Sertifikat hak guna bangunan Sertifikat hak milik	50 30 20
	Status Kepemilikan Tanah	Tanah negara Tanah masyarakat adat Tanah sengketa	50 30 20
Kondisi Prasarana dan Sarana	Kondisi jalan lingkungan	Sangat buruk >70% Buruk 50-70% Baik <50%	50 30 20
	Kondisi drainase	Genangan >50% Genangan 25%-50% Genangan <25%	50 30 20
	Kondisi air minum	Pelayanan <30% Pelayanan 30%-60% Pelayanan 60%	50 30 20
	Kondisi air limbah	Pelayanan <30% Pelayanan 30%-60% Pelayanan 60%	50 30 20
	Kondisi persampahan	Pelayanan <50% Pelayanan 50%-70% Pelayanan 70%	50 30 20

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

Proses penilaian untuk hasil setiap kriteria berdasarkan parameter yang telah dikemukakan menggunakan batas ambang yang dikategorikan kedalam penilaian tinggi, sedang, dan rendah. Parameter pada setiap variabel diinterpretasikan kedalam nilai krasifikasi, yaitu 50, 30, dan 20 dengan nilai maksimum 50 dan terendah 20. Dengan begitu batas ambang yang dihasilkan dapat diperoleh dari hasil Nilai Rentang (NR), yaitu total maksimum dan total minimum setiap variabel kriteria. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Nilai Rentang (NR)} = \frac{(\sum \text{Nilai Tertinggi} - \sum \text{Nilai Terendah})}{3}$$

Untuk $\sum$ nilai tertinggi dan $\sum$ nilai terendah untuk setiap kriteria dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Nilai Rentang dalam Penentu Kawasan Permukiman Kumuh

Kriteria	Nilai Bobot	∑ Variabel	Nilai Tertinggi	∑ Nilai Tertinggi	Nilai Terendah	∑ Nilai Terendah	NR
Vitalitas Non Ekonomi	1	8	50	400	20	160	80
Vitalitas Ekonomi	1	3	50	150	20	60	30
Kondisi Sarana Prasarana	1	5	50	250	20	100	50
Status Tanah	1	2	50	100	20	40	20
Komitmen Pemerintah	1	5	50	250	20	100	50

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

Berdasarkan tabel diatas, dalam penentuan lokasi permukiman kumuh dengan menggunakan kriteria, yaitu vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, kondisi prasarana dan sarana, status tanah, dan komitmen pemerintah masing-masing memiliki Nilai Rentang (NR), yaitu 80, 30, 50, 20 dan 50 dengan nilai bobot masing-masing 1. Sedangkan untuk pentuan prioritas permukiman kumuhnya dengan kriteria prioritas penanganan memiliki Nilai Rentang (NR) sebesar 90, 90, 60, 60 dengan nilai bobot 3, 3, 2, 2. Dengan begitu, batas ambang dapat diketahui, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.7
Batas Ambang dalam Penentu Kawasan Permukiman Kumuh

Kriteria	Kategori		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Vitalitas Non Ekonomi	320 - 400	240 - 319	160 – 239
Vitalitas Ekonomi	120 – 150	90 - 119	60 - 89
Kondisi Prasarana dan sarana	200 - 250	150 - 199	100 – 149
Status Tanah	80 - 100	60 - 79	40 - 59
Komitmen Pemerintah	200-250	150-199	100-149

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

Proses penilaian penentuan permukiman kumuh lokasi permukiman kumuh dengan penilaian tinggi, sedang, dan rendah.

B. Analisis Persepsi

Selain analisis penilaian permukiman kumuh, penilaian persepsi masyarakat terhadap lingkungan permukiman kumuh berdasarkan kriteria vitalitas non ekonomi dan parasarana dan sarana. Analisis tersebut dilakukan dengan analisis deskriptif dengan bantuan kuesioner. Dengan asumsi bahwa persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya (Yusuf, 2007). Kemudian diasumsikan juga bahwa dari hasil penilaian responden yang menjawab dominan lebih dari 50% dapat dikategorikan tingkat kesadaran tinggi, sedang, dan rendah.

Indikator dan atribut persepsi masyarakat yang digunakan dapat dilihat dari karakteristik masyarakat di permukiman kumuh. Indikator dan atribut karakteristik masyarakat permukiman kumuh sebagai berikut:

Tabel 1.8
Penilaian Tingkat Kesadaran Masyarakat

Indikator	Atribut	Penilaian		
		Sangat Buruk	Buruk	Baik
Kondisi Fisik Bangunan	Kepadatan Bangunan	3	2	1
	Jarak Antar Bangunan	3	2	1
Kondisi Kependudukan	Kepadatan Penduduk	3	2	1
Kondisi Ekonomi	Jarak Ke Tempat Mata Pencaharian	3	2	1
Status Tanah	Status Kepemilikan Tanah	3	2	1
Kondisi Prasarana dan Sarana	Kondisi Jalan Lingkungan	3	2	1
	Kondisi Drainase	3	2	1
	Kondisi Air Minum	3	2	1
	Kondisi Air Limbah	3	2	1
	Kondisi Persampahan	3	2	1

Sumber: Modifikasi Kriteria Direktorat Pengembangan Permukiman,Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2006

Berdasarkan tabel di atas maka dari 6 responden yang menilai sangat buruk lebih besar dari yang lain. Jadi dapat diasumsikan bahwa tingkat persepsi masayarakat cenderung tinggi.

C. Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat

Metode yang digunakan dalam membandingkan tingkat persepsi masyarakat dengan tingkat kekumuhan menggunakan metode deskriptif komparatif. Proses analisis perbandingan ini yaitu membandingkan secara deskriptif kategori tingkat persepsi masyarakat dengan kategori tingkat kekumuhan yang diperoleh dari hasil penilaian kuisioner dan pembobotan tingkat kekumuhan. Sehingga dapat dihasilkan tingkat kesadaran masyarakat berdasarakan perbandingan tersebut.

D. Analisis Tindak Penanganan Berdasarkan Pola Kekumuhan dan Kesadaran Masyarakat

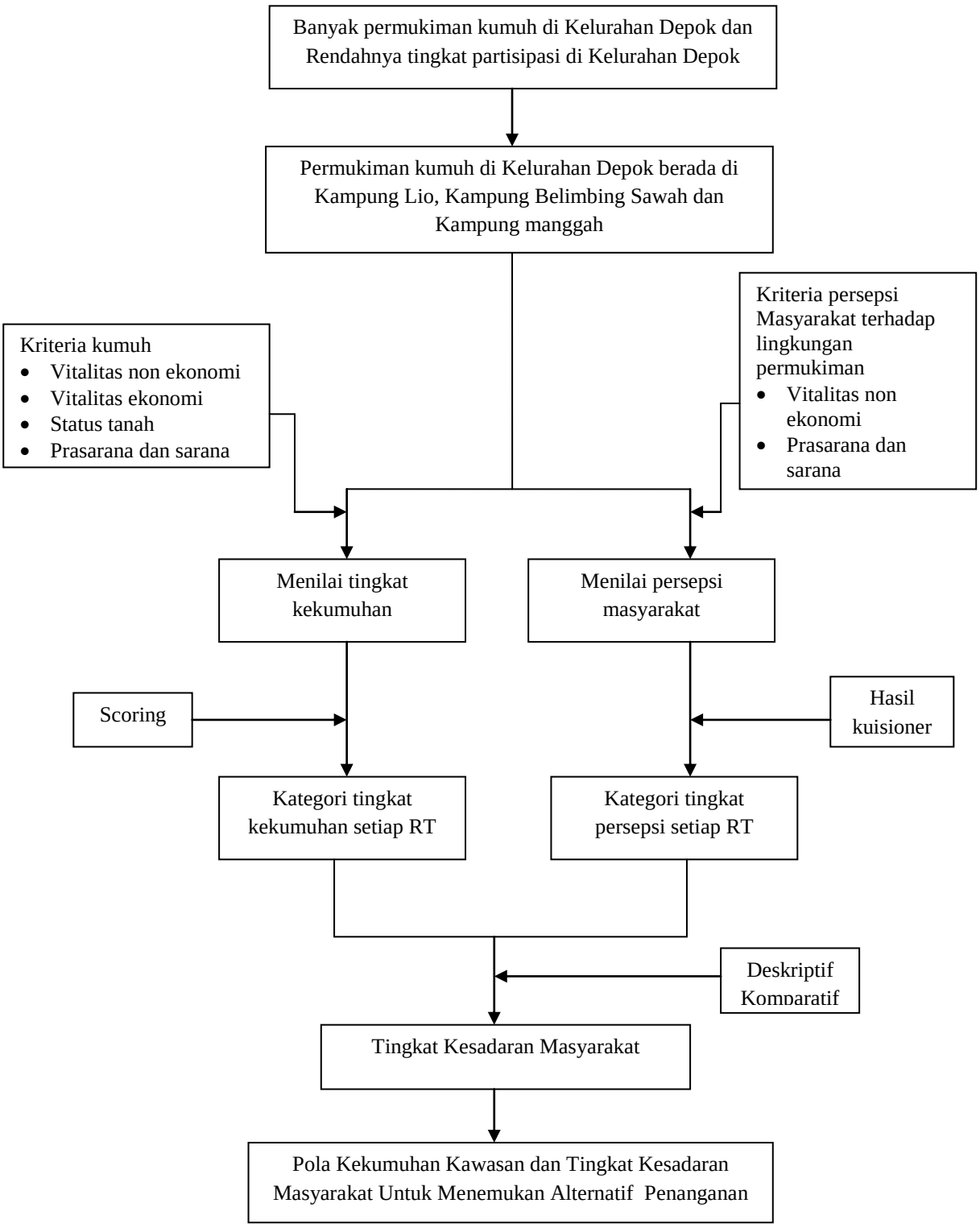
Pola kekumuhan kawasan dan kesadaran masyarakat dianalisis berdasarakan kriteria-kriteria perbandingan tingkat kekumuhan dan tingkat kesadaran masyarakat. Setelah teridentifikasi pola kekumuhan kawasan dan kesadaran masyarakat, pola-pola tersebut disesuaikan dengan kriteria penanganan kawasan untuk memberikan alternatif penanganan berdasarkan pedoman identifikasi kawasan permukiman kumuh penyanga Kota Metropolitan Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Banyaknya permukiman kumuh di Kelurahan Depok sementara tingkat partisipasi masyarakat rendah dengan asumsi bahwa tingkat partisipasi terjadi karena adanya tingkat kesadaran. Sehingga kurangnya kesadaran masyarakat di Kelurahan Depok menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di lingkungan permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kelurahan Depok berada di 3 (tiga) kampung yaitu Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah, dan Kampung Manggah.

Menilai tingkat kekumuhan berdasarkan Kriteria vitalitas non ekonomi, vitalitas eknomi, status tanah, prasarana dan sarana, serta komitmen pemerintah. Untuk menilai persepsi masyarakat berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan yang terdiri dari vitalitas non ekonomi, dan prasarana dan sarana. Penilaian tingkat kekumuhan menggunakan

metode scoring atau pembobotan sedangkan persepsi masyarakat berdasarakan hasil kuisioner sehingga menghasilkan kategori tingkat kekumuhan dan tingkat persepsi. Kemudian kedua kategori tersebut dibandingkan mengunakan metode deskriptif komparatif sehingga dihasilkan tingkat kesadaran masyarakat. Menemukan pola kekumuhan kawasan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk alternatif penanganan kawasan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2.



Gambar 1.2
Bagan Alir Penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian mengenai "Identifikasi Pola Kekumhan Kawasan dan Kesadaran Masyarakat", yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian mengenai "Identifikasi Pola Kekumuhan Kawasan dan Kesadaran Masyarakat", perumusan masalah yang akan diselesaikan oleh penelitian ini, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup wilayah penelitian dan ruang lingkup wilayah materi sebagai batasan dari penelitian, metodologi penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian.

Bab III Gambaran Umum

Bab ini secara umum menjelaskan gambaran Kelurahan Depok dan gambaran permukiman kumuh di 3 (tiga) kampung yang menjadi objek penelitian yaitu Kampung Lio, Kampung Belimbing Sawah dan Kampung Manggah.

Bab IV Analisis

Bab ini membahas analisis penilaian tingkat kekumuhan per kampung berdasakan kriteria dari Ditjen Cipta Karya yang mencakup penilaian kekumuhan terhadap kriteria vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, prasarana dan sarana, penilaian tingkat kesadaran masyarakat terhadap kekumuhan berdasarkan kriteria tingkat kekumuhan yang mencakup penilaian terhadap kriteria vitalitas non ekonomi, serta prasarana dan sarana, Perbandingan tingkat kesadaran dengan tingkat kekumuhan, mengidentifikasi pola kekumuhan kawasan dan kesadaran masyarakat untuk alternatif tindak penanganan.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.